



Keterbukaan Pasar Modal Bersaing di **Level Global**

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif: Keterbukaan Pasar Modal Bersaing di Level Global	3
Buka-bukaan di Pasar Modal	5
Membuka Detail Klasifikasi Investor	16
Memadukan Cara India dan Gaya Hong Kong	21

Artikel ini bisa di akses di <https://www.suar.id/>



Foto: K्रेसi Ai

Ringkasan Eksekutif:

Keterbukaan Pasar Modal Bersaing di Level Global

Transparansi di bursa saham, menjadi syarat utama agar industri keuangan Indonesia selevel dengan pasar modal kelas dunia.

Penulis: **Mukhlison Widodo**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), merealisasikan upaya keterbukaan di pasar saham. Dimulai dari penerbitan informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1%.

Langkah ini merupakan bagian dari empat langkah transparansi yang menjadi kesepakatan otoritas keuangan Indonesia dengan perusahaan indeks pemeringkat global.

1. *Disclosure* atas pemegang saham di atas 1%;
2. Data tipe investor yang lebih granular;
3. Peningkatan ketentuan *free float* dari 7,5% menjadi 15%;
4. Penyusunan *shareholders concentration list*.

Masyarakat khawatir indeks saham di bursa turun kelas hingga memicu nilai tukar rupiah semakin lemah. Publik pun mendorong OJK untuk bergerak cepat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Otoritas pasar modal Indonesia menyepakati perombakan standar keterbukaan data pemegang saham emiten dengan memerinci klasifikasi investor secara jauh lebih detail.

BEI bersama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan anggota bursa dan bank kustodian juga mempercepat pengisian *granularity* atau detail klasifikasi investor.

Per 27 Februari 2026, penyelesaian rencana itu telah mencapai 94%. OJK optimistis target perbaikan pengisian klasifikasi investasi itu rampung pada Maret 2026.

Transparansi data investor bertujuan memberikan informasi yang lebih

granular agar MSCI dan investor global memiliki kecukupan informasi dalam menilai *investability* saham di Tanah Air.

Usaha memperbaiki citra bursa juga bisa dilakukan dengan belajar pengelolaan pasar bursa terbaik di dunia, seperti bursa di India dan di Hong Kong.

Jika Indonesia mengadopsi disiplin *disclosure* ala Hong Kong dan *granularitas* klasifikasi ala India, maka wajah pasar akan berubah signifikan. Transparansi kepemilikan saham 1%–5% bisa:

- Mengungkap konsentrasi tersembunyi.
- Meningkatkan kualitas *free float*.
- Memperkuat kepercayaan investor ritel.

Sementara klasifikasi sub tipe investor bisa:

- Memperlihatkan siapa sesungguhnya yang menggerakkan harga.
- Membantu analisis likuiditas dan stabilitas.
- Menjadi alat pengawasan dini terhadap transaksi terkoordinasi.

Namun semakin terbuka sebuah pasar, semakin besar pula tuntutan tata kelola dan perlindungan data.



Bursa Efek Indonesia (Dok. IDX)

Buka-bukaan di Pasar Modal

Otoritas keuangan mengusahakan realisasi transparansi pasar modal secepatnya. Publik tak ingin mutu sektor industri keuangan terdegradasi.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Benediktus Krisna Yogatama, Gema Dzikri Harisma, Feby Febrina Nadeak**

Sejak 3 Maret lalu, data kepemilikan saham tercatat yang melantai di bursa dengan besaran di atas 1% dibuka untuk publik. Nama-nama pemegang saham pun terkuak. Misalnya saja pengusaha Prajogo Pangestu memiliki sejumlah saham emiten Grup Barito miliknya. Ada PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebanyak 71,37%, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) 84,1%, dan saham PT Chandra Asri Pacific (TPIA) 5,03%.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono tercatat memiliki saham di

PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) sebesar 251.617.003 saham atau setara 1,03%. Ada juga Menteri Perumahan rakyat, Maruarar Sirait yang memiliki 114.864.500 saham atau 1,91% dari total saham yang beredar di emiten BOLA, perusahaan pemilik klub sepak bola Bali United.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) secara resmi menerbitkan informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% pasca penutupan pasar, Selasa 3 Maret 2026 lalu.



Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisiner Bulanan (RDKB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (03/03/2026). (Foto:Gema Dzikri/Suar.id)

Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 tentang penetapan KSEI dan BEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik. Informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% ini disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI. “Langkah ini merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola Pasar Modal Indonesia,” katanya.

Merealisasikan komitmen transparansi

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, pengungkapan ini merupakan salah satu dari empat inisiatif yang diajukan kepada penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan FTSE Russell. Yakni *disclosure* atas pemegang saham di atas 1%, data tipe investor yang lebih granular, peningkatan ketentuan *free float* dari 7,5% menjadi 15%, serta penyusunan

shareholders concentration list.

“Pada hari ini dapat kami update bahwa saat pasar sudah tutup, *shareholders name* di atas 1% itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX. Data tersebut disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan melalui website IDX,” kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.



Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik (kiri) bersama Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSE) Samsul Hidayat (kanan) memaparkan materi dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (ANTARA/Muhammad Heriyanto)

Langkah ini juga bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola Pasar Modal Indonesia. BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi sesuai dengan *Global Best Practice*, memperdalam kualitas data pasar, serta memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Sementara itu, untuk ketentuan terkait *shareholders concentration list* atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, BEI menyatakan masih berkoordinasi intensif dengan OJK terkait metodologi dan standar verifikasi. “Kami harapkan juga ini masih sesuai dengan *timeline* untuk dapat kami sampaikan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Maret ini,” kata Jeffrey.

Saham-saham yang nantinya masuk dalam shareholder concentration list tidak akan mendapatkan sanksi khusus dari regulator

Jeffrey memastikan bahwa saham-saham yang nantinya masuk dalam *shareholder concentration list* tidak akan mendapatkan sanksi khusus dari regulator. Tujuan penerbitan *shareholders concentration list* katanya hanya sebagai panduan bagi investor global maupun investor domestik untuk mengambil keputusan investasi.

“Kemudian setelah daftar itu diterbitkan tentu perusahaan tercatat akan diminta untuk melakukan *public expose*. Dan kemudian diharapkan melakukan perbaikan. Setelah itu tentunya akan kami update list tersebut. *Shareholders concentration list* bukan berupa sanksi, itu adalah informasi,” katanya.

Membuka afiliasi pemegang saham

Konsentrasi atau afiliasi antara pemegang saham ini juga menjadi isu yang sensitif di mata indeks provider global. Salah satu hal yang memang menjadi sorotan adalah mengenai *investability*. Ketika sebuah emiten dimiliki oleh para pemegang saham yang ternyata memiliki afiliasi, bisa saja investor sangat susah melakukan investasi karena porsi saham yang tidak diperjualbelikan.

“Jadi dia enggak mau investornya karena masuk di dalam indeks dan bobotnya besar, kemudian sulit untuk mendapatkan barang. Salah satu kemungkinan kesulitan mendapatkan saham itu karena terkonsentrasi ke pihak-pihak yang mungkin tidak mau untuk menjual,” kata Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi.



Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi. (Suar.id/Gema Dzikri)

OJK pun akan memantau dan membuka informasi ini ke publik dari seluruh emiten yang tersedia, tanpa terkecuali. “Semua emiten akan kita lihat apakah ada potensi *high concentration*-nya, kan kita punya siapa yang di balik pemilik saham itu, *by name*, perusahaannya, atau perorangannya, kita tahu keterkaitan antarmereka apakah anak perusahaannya, itu yang kemudian tertangkap dalam metodologinya,” jelas Hasan.

Menurutnya, penerbitan *high concentration shareholder list* ini merupakan inisiatif yang diambil oleh pihak terkait, bukan tuntutan utama dari MSCI. Daftar ini pun tidak

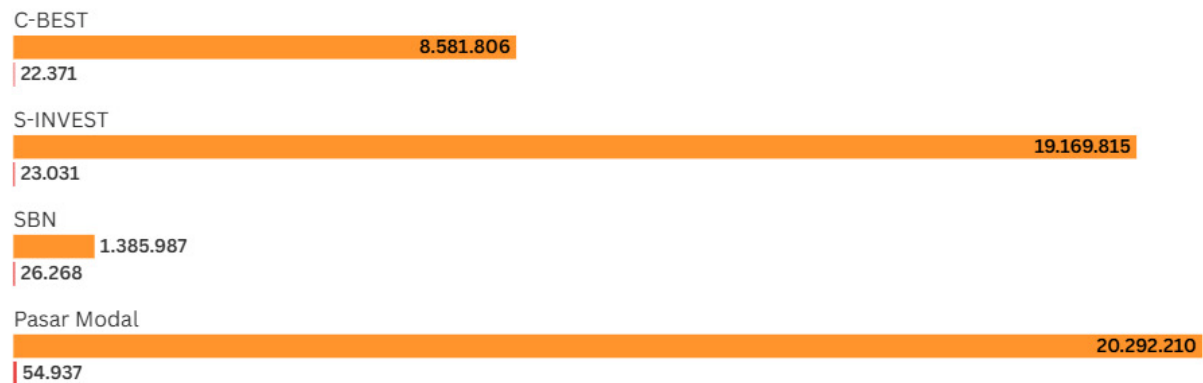
masuk ke dalam proposal besar yang diajukan, tetapi ketika dilihat oleh OJK dan BEI, hal ini menjadi praktik positif yang bisa diadopsi pasar modal.

Inisiatif ini pun mendapatkan apresiasi yang baik dari MSCI lantaran dinilai memberikan transparansi dan kredibilitas pasar modal dari peta porsi kepemilikan saham. “Ada beberapa bursa lain yang sudah menerapkan dan terbukti lebih menghadirkan transparansi dan kredibilitas, jadi ini keputusan kita secara mandiri bahwa kita ingin menghadirkan, dan ternyata diterima baik juga oleh MSCI,” katanya.

Komposisi Investor Ritel dan Institusi

(Per Desember 2025)

■ Ritel/Individu ■ Institusi



Sumber: KSEI. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Namun, belum diketahui secara pasti kapan daftar ini akan segera dipublikasikan. Hasan hanya bisa menjawab saat ini sedang dalam proses dan akan segera diimplementasikan. “Segera, setelah ada nanti jadi informasi publik,” tehas Hasan.

Pembahasan mengenai hal tersebut pun sudah dilakukan oleh OJK, BEI, hingga KSEI sejak awal bulan Februari lalu, dan diharapkan akan mulai

diberlakukan pada bulan Maret 2026 ini.

“OJK bersama BEI dan KSEI telah bersama-sama melakukan asesmen mengenai potensi implementasi untuk mengumumkan *high shareholding concentration*, dan saat ini telah melakukan finalisasi atas asesmen dan uji coba serta kajian dimaksud dengan rencana implementasi mulai dilakukan bulan Maret 2026 ini,” Hasan menjelaskan.

Kuatkan daya saing bursa dengan demutualisasi

Selain transparansi, pihak otoritas keuangan juga telah memulai proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Langkah ini diyakini bisa memperkuat daya saing pasar modal domestik di tingkat regional. Adapun, saat ini regulator tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) secara internal di Kementerian Keuangan.

Menurut Hasan Fawzi, demutualisasi ini memang sudah menjadi standar global yang berlaku di regional dan juga global. Hampir semua bursa besar atau modern sudah menuju atau sedang melakukan upaya demutualisasi, seperti Bursa Efek Indonesia.

Proses demutualisasi ini pun tidak harus melakukan penawaran perdana ke publik atau IPO di tahap awal. Namun, dengan adanya unsur tambahan anggota dari luar anggota bursa, pengambilan keputusan di bursa diharapkan dapat menjadi lebih berimbang.

“Demutualisasi menjadi tren yang perlu kita adopsi, kita berharap dengan masuknya unsur pemilik lain di luar anggota bursa, maka kemudian menjadi jauh lebih punya kesempatan tidak ada *conflict of interest*,” jelas Hasan.

Dari sisi akses pendanaan juga menjadi lebih terbuka. Sebelumnya, bursa tidak memiliki sarana untuk mendapatkan pendanaan atau permodalan baru. Dengan adanya demutualisasi, bursa dapat mengembangkan dan melakukan pemenuhan infrastruktur yang selama ini dibutuhkan.

Bertambahnya pemegang saham di Bursa Efek Indonesia juga diharapkan mampu membawa dan menghadirkan IPO-IPO baru yang memang secara fundamental emitennya berkualitas.

“Dengan pemilik baru yang nantinya *strategic partner* kita harapkan dia punya *influence* dong untuk menghadirkan IPO-IPO baru yang tidak hanya mengejar kuantitas tapi memang berkualitas dan ditunggu investor selama ini,” ungkapnya.

Saat ini, pihak OJK masih menunggu Peraturan Pemerintah di mana nantinya di dalamnya terdapat rumusan aturan pelaksanaan terkait dengan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Namun, Hasan memastikan bahwa pastinya PP yang nantinya terbit itu akan sejalan sesuai dengan yang diamanatkan di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kebetulan kami sudah menyampaikan tanggapan resmi, mohon dimaklumi saat ini RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) itu masih secara internal dilakukan rumusan finalisasinya di Kemenkeu, kami tidak dapat menyebutkan norma-norma pasal yang ada,” ucapnya.

Di dalam RPP tersebut juga akan dijabarkan aturan pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sehingga nantinya akan dijadikan acuan oleh OJK hingga BEI terkait dengan bagaimana mekanisme dan struktur untuk melaksanakan tahapan menuju demutualisasi.

Keterbukaan struktur kepemilikan

Reformasi di sektor industri keuangan menurut Pjs Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Friderica Widyasari Dewi kini sudah terlihat dan membuahkan hasil yang memantik kepercayaan publik.



Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi. (Suar.id/Gema Dzikri)

Phak OJK bersama BEI juga telah merancang 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Salah satu rencana aksi dalam meningkatkan transparansi, adalah mengenai keterbukaan soal *Ultimate Beneficial Ownership*.

“Kita mendorong keterbukaan struktur kepemilikan hingga tingkat pemilik manfaat akhir atau UBO itu sendiri, tentu disertai penguatan pengawasan terhadap bagaimana afiliasinya atau hubungan pengendali untuk mencegah praktik-praktik *nominee* yang tersembunyi,” jelas Friderica.

Tentu ini juga disertai dengan penguatan pengawasan dan enforcement terkait transparansi UBO dan afiliasi pemegang saham. Langkah lain juga mendorong adanya penguatan data kepemilikan saham, di mana OJK memerintahkan KSEI untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan *reliable*.

Hal ini dilakukan dengan cara mendetailkan tipe investor dengan mengacu pada *best practices global*, serta penguatan ketentuan *disclosure* pemegang saham emiten.

Diikuti negeri tetangga

Apa yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia ini menariknya juga dicontoh oleh beberapa otoritas negara lain seperti Malaysia dan juga Filipina. Salah satu penyebabnya, mereka juga melihat bagaimana market Indonesia dan juga persaingan dalam memperebutkan likuiditas yang semakin ketat kedepannya.

Malaysia di *main market* menetapkan minimum *free float* sebesar 25% dengan fleksibilitas bagi emiten besar. Otoritas Malaysia juga mengambil langkah untuk memperkuat transparansi struktur kepemilikan saham, khususnya yang terkait dengan penggunaan akun *nominee*.



Kantor vursa efek Malaysia

“Kita melihat bagaimana Otoritas Malaysia selain menerapkan minimum *free float* 25% di *main market* juga memperkuat transparansi *nominee account* dengan memperjelas identifikasi akun *nominee*, meningkatkan visibilitas konsentrasi kepemilikan, serta memisahkan klasifikasi UBO, institusional, dan ritel,” kata Frederica.

Sementara itu di Filipina, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina membatalkan kebijakan opsi pelonggaran aturan *free float* dari 20% menjadi 12%. Filipina juga menghapus pendekatan *one size*

fit all terhadap minimum *free float* dan menggantinya dengan skema bertingkat berbasis kapitalisasi pasar.

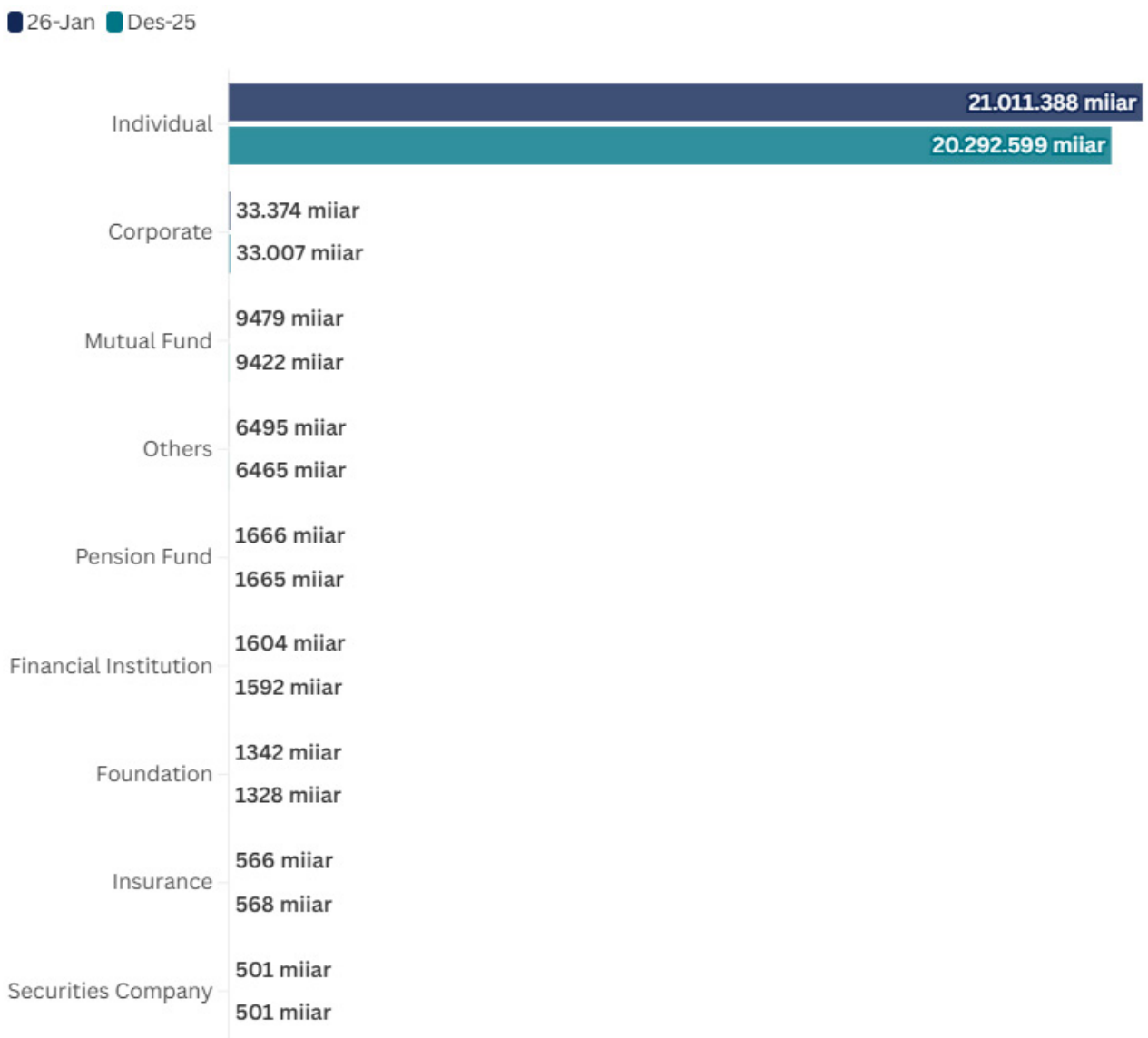
“Di Filipina, mereka membatalkan kebijakan penurunan batas minimum *free float*, tadinya mereka mau menurunkan mungkin karena melihat trend-nya di otoritas lain menaikkan *free float* jadi mereka membatalkan apa yang sudah mereka rencanakan. Tadinya 20% menjadi 12%, menggantinya dengan penerapan skema bertingkat minimum *free float* berbasis *market cap*,” jelasnya.

Kurang berefek ke investor ritel

Bagi sebagian investor ritel, kebijakan baru ini meski akan berpengaruh pada perilaku berinvestasi, namun dampaknya memang dirasa kurang maksimal buat mereka. Seperti kata Hariyanto, investor ritel penuh waktu. Dia telah menjadi investor pasar modal sejak 2005 lalu. Saat itu, ia yang karyawan divisi keuangan dari sebuah perusahaan multinasional memilih pensiun dini lalu mendedikasikan waktunya sebagai investor pasar modal.

Setiap hari sejak pukul 09.00 hingga 16.00 Hariyanto selalu memantau pergerakan saham dari laptopnya. Di meja kerjanya, tersusun rapi kertas catatan perhitungan dan pergerakan saham tiap-tiap emiten yang jadi perhatiannya. Dari hasil bermain saham, Hariyanto sukses menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus sarjana.

Komposisi Detail Investor



Sumber: KSEI • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

SUAR SOLUTION JOURNALISM
OF EXECUTIVES

Menurutnya, kebijakan baru soal transparansi itu akan lebih bermanfaat bagi investor korporasi besar yang hendak berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dalam berinvestasi, para korporasi besar

membutuhkan pengetahuan siapa saja yang memegang saham di emiten tersebut. Ini karena perusahaan besar itu tentu ingin dapat hasil optimal dari berinvestasi saham di emiten-emiten tertentu.

Kebijakan baru soal transparansi itu akan lebih bermanfaat bagi investor korporasi besar yang hendak berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Mereka tentu tidak ingin investasinya semacam tersangkut di satu emiten, karena saat membeli saham tersebut, lantas mereka tidak bisa menjualnya alias tidak *liquid*. Biasanya ini terjadi lantaran emiten tersebut dikuasai sejumlah investor lain dengan porsi kepemilikan saham yang cukup besar atau lebih dari 1%, sehingga cukup bisa mengendalikan perdagangan saham di emiten tersebut.

“Kalau ada aturan transparansi ini, harapannya investasi mereka jadi tidak ‘tersangkut’, karena akan terlihat siapa saja yang berinvestasi di emiten tersebut,” ujar Hariyanto. Hal serupa juga dikatakan oleh investor ritel lainnya, Banyu Suryanto. Ia mengatakan, investor ritel itu transaksinya tidak besar, jadi tidak terlalu melihat siapa pemilik saham dari suatu emiten.

Berbeda dengan Hariyanto, pria 35 tahun ini bukan investor penuh waktu yang mengambil untung jangka pendek secara harian. Dia adalah investor ritel dengan rentang jangka panjang.

Banyu bercerita, dalam membeli saham dirinya rata-rata hanya membeli 1-2 lot itu dengan biaya yang dikeluarkan berkisar Rp 1 juta – Rp 2 juta tergantung harga sahamnya. Itu pun biasanya dia hanya beli saham setelah gaji di akhir bulan.

“Sebagai investor jangka panjang saat beli saham, saya lebih perhatikan fundamental perusahaannya. Cari emiten dengan nama besar, telah terbukti. Jadi saya tidak terlalu perhatikan siapa pemilik sahamnya,” ujar karyawan swasta bidang teknologi ini.

Publik memantau perbaikan oleh otoritas

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, langkah OJK, BEI, dan pihak terkait lainnya merevitalisasi pasar modal sudah cukup baik. Namun, masalahnya

belum selesai sampai di situ. “Gejolak saham itu adalah salah satu hal yang seharusnya bisa dicegah, kalau memang apa yang terjadi di perusahaan itu memang menggambarkan realitas di perekonomian,” katanya.



Pengunjung memotret layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/3/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Pasar modal memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, meski sebagian besar ekonomi Indonesia itu tidak bergantung dari pasar saham, namun ke sektor riil. Tetapi, dinamika yang terjadi di pasar saham juga turut menentukan. .

Pasar modal berperan dalam alokasi dan mobilisasi modal yang efisien, sehingga mengarahkan tabungan ke investasi produktif. Pada akhirnya, akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. “Kita tahu *financial deepening* di Indonesia sangat diperlukan ya, terus kemudian juga agregasi informasi mekanisme sinyal,” ungkapnya.

Karenanya penting untuk menjaga agar pasar modal Indonesia tidak dikategorisasikan sebagai *frontier market*, seperti yang sempat diwacanakan oleh MSCI.

“Karena ketika sudah jadi *frontier market* maka isunya ke-mana-mana. Nanti akan *hit* ke pasar obligasi, *yield-*

nya jadi lebih mahal. Sudah masuk kategori *emerging market* saja kita masih mahal *yield*-nya, apalagi kalau sudah *frontier market*,” tegasnya.

Apa yang terjadi di bursa, juga selalu menjadi perhatian publik. Masyarakat khawatir indeks saham di bursa turun kelas hingga memicu nilai tukar rupiah semakin lemah. Masyarakat pun mendorong OJK untuk bergerak cepat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini terindikasi dari data yang dihimpun oleh INDEF pada periode 26-31 Januari 2026. Dimana publik membanjiri media sosial dengan tuntutan kepada pihak otoritas untuk bergerak cepat menyelesaikan masalah.

“Para netizen itu menuntut OJK dan perusahaan efek Indonesia gerak cepat. Kemudian ada sekitar 6 ribu perbincangan terkait dengan BEI, 5.550 terkait presiden, dan juga 3.400 terkait OJK. Ini gambaran terutama masyarakat itu *concern* terhadap isu yang terjadi,” ungkapnya.



Pengunjung beraktivitas di main hall Bursa Efek Indonesia

Membuka Detail Klasifikasi Investor

Sebagai langkah transparansi, otoritas menyempurnakan klasifikasi investor lebih granular. Menempatkan BEI sejajar dengan bursa di negara maju.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Gema Dzikri Harisma, Feby Febrina Nadeak**

Sehari setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia bertemu dengan tim penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 2 Februari 2026 lalu, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), salah satu dari tiga lembaga non-pemerintah yang berwenang membuat dan menegakkan peraturan industri yang tergabung dalam *Self-Regulatory Organization* pun, bekerja cepat.

KSEI pada 3 Februari 2026 itu langsung menggelar sosialisasi kepada Anggota Bursa dan Bank Kustodian untuk mendukung penyediaan data investor yang lebih detail dan granular. “Penyediaan data investor yang lebih detail menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor,” ujar Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat.



Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat(Suar.id/Feby Nadeak)

Sosialisasi tersebut, bertujuan meningkatkan detail dan granularitas data investor. Inisiatif ini menargetkan reklasifikasi 35.022 *Single Investor Identification* (SID) guna memperkuat integritas pasar modal, dengan pengumpulan data yang dijadwalkan selesai pada Maret 2026.

BEI bersama KSEI, dan anggota bursa dan bank kustodian juga mempercepat pengisian *granularity* atau detail klasifikasi investor. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas permintaan MSCI untuk

meningkatkan transparansi data pemegang saham di pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, pertemuan antara otoritas keuangan Indonesia dengan MSCI di Gedung BEI, Jakarta itu membahas tentang proposal Indonesia terkait revitalisasi pasar modal tanah air. Rapat yang juga dihadiri KSEI serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara itu menggarisbawahi komitmen otoritas keuangan Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar, termasuk pembukaan

Sub tipe investor yang lebih beragam

Dan berkat kerja cepat, janji itu pun segera terealisasi. Samsul Hidayat dalam konferensi pers di Gedung BEI Jakarta, Selasa 3 Februari 2026 lalu melaporkan progres penyajian tipe investor yang lebih granular. Ia menyebut, per 27 Februari 2026 pembaruan data telah mencapai 97% untuk kategori

corporate dan *others*, serta 93% untuk total investor institusi .

“Jadi insyaAllah kami juga sudah akan bisa menyediakan data tersebut berdasarkan komitmen kita adalah data per akhir Maret 2026. Dan mudah-mudahan kita bisa sediakan di awal April 2026,” katanya.



Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik (kiri) bersama Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSE) Samsul Hidayat (kanan) memaparkan materi dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Suar.id/Feby Nadeak)

Samsul menjelaskan, saat ini struktur data investor sebenarnya sudah baik, tapi perlu dioptimalisasikan. Ia mengatakan jenis data investor sebenarnya ada dua, yaitu investor individu dan investor institusi.

Sebelumnya, kategori investor dibagi jadi 9 tipe. Adapun 9 tipe investor tersebut adalah individu, Corporate (CP), Others (OT), Financial Institution

(IB), Insurance (IS), Foundation (FD), Mutual Fund (MF), Pension Fund (PF), dan *securities company*.

Menurut Samsul, kategori investor Corporate (CP) dan Other (OT) nantinya akan dipecah menjadi 28 sub-tipe. Namun, secara keseluruhan akan ada 48 hingga 49 sub-tipe investor.

Klasifikasi Investor Tipe Corporate & Others (28 Sub-Tipe)

Sub-Tipe (1-14)	Sub-Tipe (15-28)
1. Private Equity	15. State Owned Company
2. Trustee Bank	16. Corporate
3. Venture Capital	17. Government
4. Private Bank	18. Sovereign Wealth Fund
5. Investment Advisors	19. Association / Social Organizations
6. Brokerage Firms	20. Central Bank
7. Investment Fund Selling Agent	21. Diocese
8. State-owned Enterprises	22. Conference
9. Permanent Establishment	23. Congregation
10. Commanditaire Vennootschap (CV) / L	24. Cooperatives
11. Firm	25. International Organization
12. Capital Market Supporting Institutions	26. Political Parties
13. Peer to Peer Lending	27. Partnership
14. Sole Proprietorship	28. Educational Institution

Informasi investor yang granular

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi mengatakan, penetapan data investor tersebut berdasarkan hasil kajian dan usulan dari KSEI sebagai pengelola data kepemilikan saham perusahaan terbuka.

“Kami memberikan arahan untuk dilakukan peningkatan transparansi pengungkapan keterbukaan informasi kepemilikan saham emiten, dengan pengungkapan data terperinci atau *granularity*, yang akhirnya ditindaklanjuti oleh KSEI yang kemudian diperinci lagi,” kata Hasan kepada SUAR.



Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi saat bicara di Market Outlook 2026 Capital Market Reform: Integrity and Credibility di Jakarta Selasa, (3/3/2026) (Suar.id/Gema Dzkri)

Selain memperluas sub tipe klasifikasi investor, akan terdapat rekap terkait klasifikasi investor berdasarkan kemungkinan afiliasi atau tidaknya. “Kita *provide* juga nanti ke publik dan ke MSCI. Misalnya, berapa yang afiliasi, terindikasi berafiliasi. Itu nanti untuk dasar jika dipertimbangkan mau diikutkan atau tidak, dalam

rangka perhitungan indeksnya,” ujar Hasan.

Hasan menambahkan, transparansi data investor bertujuan memberikan informasi yang lebih granular agar MSCI dan investor global memiliki kecukupan informasi dalam menilai *investability* saham di Tanah Air.

Menurutnya, klasifikasi investor ini tak lagi berhenti pada kelompok besar, tapi bakal dirinci hingga sub-tipe yang lebih spesifik, mulai dari *government*, *private equity*, *trustee*, *bank*, *venture capital*, hingga *peer-to-peer lending* dan *permanent establishment*.

Selain memperluas jumlah sub-tipe, OJK juga akan menyajikan data

Merepresentasikan kondisi bursa sebenarnya

Detail klasifikasi investor ini juga dilakukan untuk memperbaiki definisi dan perhitungan *free float*, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan saham yang benar-benar tersedia dan aktif diperdagangkan di pasar.

Dengan data granular tersebut, MSCI diharapkan dapat menilai secara lebih akurat apakah suatu saham layak dimasukkan dalam perhitungan indeks global. “Yang penting kan buat mereka ada informasinya jelas, sehingga mereka bisa punya kecukupan informasi apakah dia akan *consider* diikuti atau tidak,” cakup Hasan.

Sebuah kemajuan besar

Menanggapi rencana perluasan klasifikasi investor ini, CEO Akela Trading System Hary Suwanda menilai kebijakan ini sebagai kemajuan besar. “Dengan perluasan ini, analis bisa membedakan mana “uang panas” (*short-term*) dan mana “uang dingin” (*long-term*),” katanya.

Langkah itu, sambung Hary, juga akan menempatkan BEI sejajar dengan bursa maju seperti

rekapitulasi investor berdasarkan kemungkinan afiliasi, termasuk keterkaitan dengan manajemen perusahaan tercatat.

“Misalnya bagian dari BOD atau BOC dari saham itu. Berapa banyak? Yang namanya *controller*, *treasury*, yang *government* tadi berapa? Nah, jadi lengkap tuh,” jelasnya.

Sedangkan mengenai klasifikasi dana pensiun dan BPJS, Hasan menyatakan investor akan diklasifikasikan berdasarkan fungsi utamanya, bukan semata status pemerintah. “Jadi *government* ada pasti, tapi dia ada *pension fund*. Jadi kemungkinan lebih ke *pension fund*. Lalu ada *insurance*,” ungkapnya.

Sehingga meskipun suatu entitas dimiliki pemerintah, klasifikasinya bakal mengikuti jenis kegiatan investasinya. Seperti, BPI Danantara akan diklasifikasikan secara khusus sebagai *sovereign wealth fund*. “Bahkan *sovereign wealth fund* pun ada nih, klasifikasi tersendiri,” terang Hasan.

Korea Exchange atau Tokyo Stock Exchange, yang memiliki data arus dana (*flow*) sangat detail per segmen investor.

Bagi emiten, manfaatnya tak kalah besar. Emiten bisa mengetahui apakah saham mereka lebih diminati oleh asuransi atau reksa dana. Dengan memahami sub-tipe, emiten bisa memprediksi perilaku pemegang saham saat terjadi gejolak pasar.



Pengunjung melintas di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/3/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Memadukan Cara India dan Gaya Hong Kong

Indonesia bisa belajar mengelola pasar bursa dari praktik terbaik di dunia. Yang dilakukan bursa di India dan bursa di Hong Kong persis yang direncanakan di bursa Indonesia.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Gema Dzikri Harisma, Feby Febrina Nadeak**

Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu peribahasa yang pas untuk menggambarkan bagaimana para otoritas pengelola keuangan mendapatkan dorongan agar bisa segera melakukan reformasi industri pasar keuangan Indonesia. Karena peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) akhir Januari 2026 lalu, usaha melakukan

proses transparansi di bursa saham Indonesia pun semakin terbuka.

Plt Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan, sejak awal, pihaknya menjadikan momentum reformasi di pasar modal sebagai tonggak awal untuk menguatkan transparansi di lembaga itu, sehingga mendorong Bursa Efek Indonesia bisa naik level.



Plt Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik ANTARA/HO-BEI.

“Komitmen kami adalah agar Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia. Setara dengan bursa-bursa global. Tidak hanya soal kapitalisasi pasar dan nilai transaksi. Tetapi juga soal transparansi dan tata kelola,” kata Jeffrey kepada saat ditemui SUAR di kantornya Rabu, 25 Februari 2026 lalu.

Menurut Jeffrey, sesuai dengan diskusi dengan tim dari MSCI, sebagai bagian dari usaha transparansi itu, pihak bursa akan mempublikasikan nama-nama pemegang saham di atas 1%, juga data investor melalui klasifikasi yang lebih granular.

Selain itu, pihak bursa juga akan menerbitkan *shareholders concentration list*. Yaitu data dari saham-saham yang terindikasi pemegang sahamnya berkonsentrasi. Data ini bisa digunakan baik oleh investor ritel maupun korporasi. “Kami tidak berhenti di situ. Tidak hanya soal apa yang diminta oleh MSCI. Tapi kita juga menyisir secara keseluruhan transparansi dan tata kelola apalagi yang bisa kita lakukan,” ujar Jeffrey.

Belajar dari bursa dunia

Bulan ini, usaha ke arah keterbukaan itu sudah direalisasikan. Pihak BEI bersama dengan KSEI telah meluncurkan informasi kepemilikan saham di atas 1% demi menciptakan pasar modal yang lebih transparan. Informasi ini pun akan dipublikasikan melalui situs BEI setiap bulannya.

Pihak otoritas juga sudah memperpanjang daftar klasifikasi investor. Beberapa perbaikan lainnya yang bisa diambil juga mengambil mencontoh dari pasar modal negara lain yang sudah maju seperti di

negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark yang tergolong pasar maju atau *developed Market*, dapat dijadikan tolok ukur bagi Indonesia.

Di negara-negara tersebut, kepemilikan publik di atas 1% diungkap secara terbuka, sementara data kepemilikan di bawah 1% juga tetap dapat diakses melalui permintaan. Standar ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan praktik yang berlaku di Indonesia saat ini.



Kantor pusat NSE India

Sementara itu, India sebagai sesama pasar berkembang, atau *emerging market*, juga telah melangkah lebih jauh dengan mengungkap kepemilikan entitas pada kisaran 1%–5%, seperti reksa dana dan

perusahaan asuransi. Praktik ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, yang umumnya hanya membuka kepemilikan di atas 5% kecuali untuk pihak terafiliasi.

Meski India belum sepenuhnya mengungkap *ultimate beneficial owner* (UBO) di balik setiap entitas, kepemilikan signifikan oleh pemegang saham utama, seperti pendiri, tetap disampaikan kepada publik. “Waktu itu India juga menghadapi concern yang sama dari MSCI. Mereka juga akhirnya

mengungkap pemegang saham di atas 1%,” jelas Jeffrey.

BEI bersama dengan OJK juga sedang mempersiapkan untuk menerbitkan *shareholder concentration list*, di mana nantinya dalam mekanisme tersebut mereka akan mengungkap afiliasi di balik nama kepemilikan saham sebuah emiten.



Kantor Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Dalam hal pengawasan konsentrasi kepemilikan saham, Hong Kong dapat menjadi *benchmark* yang kuat. Sejak 2015, MSCI telah menyoroti saham-saham di Hong Kong yang memiliki risiko konsentrasi kepemilikan tinggi. Otoritas setempat melalui *Securities and Futures Commission* (SFC) secara aktif menerbitkan daftar saham dengan konsentrasi pemegang saham tinggi atau HSC list.

“*Shareholder concentration list* itu juga dilakukan oleh Hong Kong pada saat mereka menghadapi *concern* yang sama dari MSCI. Hong Kong akhirnya menerbitkan *shareholder concentration list* dan sampai sekarang itu ada,” lanjutnya.

Menggabungkan dua *best practice*

Dengan menggabungkan praktik baik dari kedua bursa di negara tersebut, Jeffrey optimis Bursa Efek Indonesia akan menjadi salah satu bursa yang paling transparan dibandingkan dengan bursa-bursa di negara lain.

“Kita akan menggabungkan *best practices* yang ada di India dan di Hong Kong, kita akan lakukan itu di sini sehingga setelah ini sepertinya kita akan menjadi salah satu bursa yang paling transparan,” ia berharap.



Pembukaan perdagangan saham 2026 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Pengelolaan pasar keuangan di India dan Hong Kong memang menjadi *benchmark* bagi pengelolaan bursa modern dunia. Bagi Indonesia meniru bursa di Hong Kong bisa menerapkan *shareholders concentration list*, yang kebetulan tidak diterapkan di India.

Sehingga jika Indonesia menerapkan kedua platform tadi, maka bursa di Indonesia bisa jadi lebih transparan dari bursa di India dan bursa di Hong Kong. “Jadi terlepas diminta atau tidak oleh MSCI, transparansi ini akan tetap kita lakukan. Dan masih banyak yang akan kita lakukan ke depan,” kata Jeffrey.

Bersiap untuk kompetisi global

Penguatan karakter bursa menggabungkan dua karakteristik besar ini juga mendapat dukungan *Chief Investment Officer (CIO)* Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)

Pandu Sjahrir. Menurutnya Indonesia seharusnya tidak lagi membandingkan diri dengan pasar-pasar kecil di kawasan, melainkan langsung mengacu pada pasar modal yang telah mendunia.



Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir (tengah), Pj Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari Dewi (kanan), dan Pj Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik (kiri) menyampaikan keterangan terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026).

“Kita harus berkompetisi secara global. Kompetisi kita bukan negara tetangga. Lupakan itu. Patokan kita harus India dan Hong Kong,” ujarnya. Ia pun mendorong agar Indonesia tidak ragu meniru praktik terbaik dari pasar-pasar besar tersebut. “Tiru saja. Jangan mengacu ke pasar yang lebih kecil,” tegas Pandu.

Jika Indonesia mengadopsi disiplin *disclosure* ala Hong Kong dan granularitas klasifikasi ala India, maka wajah pasar akan berubah signifikan. Transparansi kepemilikan 1%–5% bisa mengungkap konsentrasi

tersembunyi, meningkatkan kualitas *free float*, dan memperkuat kepercayaan investor ritel.

Sementara klasifikasi 27 subtype investor bisa memperlihatkan siapa sesungguhnya yang menggoreng harga, membantu analisis likuiditas dan stabilitas, dan menjadi alat pengawasan dini terhadap transaksi terkoordinasi. Namun semakin terbuka sebuah pasar, semakin besar pula tuntutan tata kelola dan perlindungan data.

Manfaat buat investor dan regulator

Dengan rancangan saat ini, Indonesia punya kesempatan besar untuk menggabungkan dua karakteristik pasar yang menjadi unggulan dalam pengelolaan pasar modal modern. Indonesia bisa meniru pasar modal di Hong Kong dengan transparansi dan disiplin pasar. Dimana di bawah pengelolaan Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), transparansi kepemilikan menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur pasar.

Hong Kong menerapkan rezim *Disclosure of Interests*, di mana pemegang saham yang

melampaui ambang tertentu wajib melaporkan kepemilikannya, dan setiap perubahan signifikan harus disampaikan secara cepat. Publik dapat melacak siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan siapa yang diam-diam menambah posisi.

Yang menarik bukan hanya ambang batasnya, tetapi budaya kepatuhan dan kecepatan pelaporan. Pasar diasah untuk peka terhadap konsentrasi kepemilikan. Investor global yang bertransaksi di sana, merasa memiliki visibilitas yang cukup terhadap struktur pengendalian perusahaan.



Photo by Jakub Žerdzicki / Unsplash

Sementara bursa di India, publik bisa membaca pasar dari peta investornya. Jika Hong Kong unggul dalam disiplin *disclosure*, India melangkah lebih jauh dalam hal klasifikasi investor.

Melalui pengawasan Securities and Exchange Board of India (SEBI) dan operasional bursa seperti National Stock Exchange of India (NSE), pasar India secara rutin mempublikasikan komposisi kepemilikan saham seperti promoter (pengendali), investor ritel, *domestic institutional investors* (DII), *foreign portfolio investors* (FPI), dana pensiun, asuransi, hingga reksa dana.

Setiap kuartal, publik bisa membaca peta kekuasaan dalam sebuah emiten. Apakah saham dikuasai keluarga pendiri? Apakah dana asing mendominasi? Apakah investor ritel membesar?

Granularitas data ini memberi dua manfaat sekaligus: Pertama investor dapat membaca dinamika kekuatan pasar dan kedua, regulator memiliki alat analitik untuk mendeteksi konsentrasi dan potensi manipulasi.

Pengamat Pasar Modal Hans Kwee juga sepakat jika Indonesia bisa

menjadikan India dan Hong Kong sebagai acuan dalam mereformasi pasar modal. India katanya melakukan reformasi pasar modal pada 2010. Indonesia bisa belajar dari India dalam menaikkan ambang batas minimum *free float*.

“Salah satu yang dilakukan India, mereka menaikkan margin *free float* jadi 25%. Dia memberikan waktu tiga sampai 5 tahun. Akhirnya India bisa narik modal asing sampai US\$1,25 triliun. Bobot MSCI dia juga naik dari 8% di 2020 jadi 18% di 2024,” katanya.

Sedangkan dari Hong Kong, sambung Hans, Indonesia bisa belajar memperketat pengawasan terhadap saham-saham yang kepemilikannya sangat terkonsentrasi pada segelintir pihak. Cara yang sudah disiapkan Indonesia adalah menyampaikan pemegang saham di atas 1% dari sebelumnya 5%. Hal itu katanya sesuai dengan perhatian MSCI.

“Sebenarnya yang dituntut MSCI bahwa dia mau tahu saham ini *concentrated* atau enggak. Jadi dengan dibukanya data 1% ke atas nanti dia tahu ada afiliasi atau enggak,” katanya.



SUAR

Jurnalisme Solusi Penggerak Dunia Usaha



Kontak : CS SUAR

 088219993888

 @suarinspirasi

 office@suar.id

 Suar Inspirasi Produktif

 Suar Inspirasi Produktif

 www.suar.id